

EVALUASI DAN KRITIK TERHADAP PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA: PERSPEKTIF GURU, SISWA, DAN PENGELOLA PENDIDIKAN

M. Afiquil Adib

Universitas Islam Lamongan
afiquladib@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Published : 26 Feb 2025	<i>Penelitian ini mengevaluasi dan mengkritisi pelaksanaan Kurikulum Merdeka dari perspektif guru, siswa, dan pengelola pendidikan. Meskipun Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan kebebasan dalam pembelajaran, implementasinya yang terlalu mendadak menyebabkan berbagai kendala. Guru-guru tidak siap, pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tidak maksimal, dan pembimbing P5 seringkali tidak memahami tugasnya, sehingga efektivitas pelaksanaannya masih rendah. Selain itu, kesalahpahaman terhadap konsep P5 telah menyebabkan beban ekonomi tambahan bagi siswa, yang bertentangan dengan tujuan inklusivitas kurikulum. Di sisi lain, beban administrasi yang berat juga menjadi tantangan bagi guru penggerak, menghambat untuk fokus pada pengembangan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam dan perbaikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka agar tujuan pendidikan yang lebih baik dapat tercapai.</i>
Keywords Kurikulum Merdeka, Evaluasi Kurikulum, Pendidikan Indonesia Merdeka Curriculum, Curriculum Evaluation, Indonesian Education	

PENDAHULUAN

Penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia menjadi langkah penting dalam reformasi pendidikan, bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kebebasan bagi sekolah, guru, dan siswa dalam mengelola proses pembelajaran. Kurikulum ini dirancang agar lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks kebutuhan pembelajaran, diharapkan mampu mendukung pembentukan karakter siswa yang kuat serta kompetensi yang selaras dengan perkembangan era modern. Dengan penyesuaian tersebut, Kurikulum Merdeka diharapkan tidak hanya menambah wawasan siswa, tetapi juga menyiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dalam pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai "ruh" yang menjadi landasan pembelajaran dan harus terus dievaluasi secara dinamis, inovatif, dan berkala.¹ Penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat, merupakan langkah krusial dalam memastikan lulusan yang berdaya saing tinggi.²

Sebab, kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang strategis di dalam sistem pendidikan.³ Selain itu, sebagai tahap awal dalam program pendidikan, perencanaan kurikulum memainkan peran penting dalam pelaksanaannya. Kurikulum yang tidak direncanakan dengan baik berpotensi menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai, sehingga setiap proses penyusunan kurikulum membutuhkan perhatian mendalam.⁴

Sebelumnya, Kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat siswa sebagai sumber daya yang berdaya guna. Berbeda dengan itu, Kurikulum Merdeka memberi perhatian lebih pada pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan individual siswa serta menekankan pengembangan karakter dan kompetensi dasar, sekaligus menciptakan sistem pembelajaran yang relevan dan interaktif sesuai dengan kebutuhan masa kini.⁵

Pembelajaran dengan paradigma baru yang terkandung dalam konsep Merdeka Belajar juga mendorong setiap guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa.⁶ Merdeka Belajar memiliki nilai representatif di mana siswa diberi keaktifan dan kebebasan dalam

¹ Ujang Cepi Barlian, Siti Solekah, dan Puji Rahayu, "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 12 (2022), <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.

² Rendika Vhalery, Albertus Maria Setyastanto, dan Ari Wahyu Leksono, "Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur," *Research and Development Journal of Education* 8, no. 1 (2022): 185–201, <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>.

³ Maman Suryaman, "Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar," dalam *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 2020, 13–28.

⁴ Cut Reza Wulandari, Tia Ayu Ningrum, dan Syahril, "Kepemimpinan Transformasional Kepala SMK Negeri Se-Kota Padang," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 1 (2024): 66–75, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i1.250>.

⁵ Angel Pratyca dkk., "Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 58–64, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1974>.

⁶ Putri Jannati, Faisal Arief Ramadhan, dan Muhamad Agung Rohimawan, "Peran Guru Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35931/am.v7i1.1714>.

belajar, sesuai dengan semangat kebebasan dalam kurikulum ini. Dengan pendekatan tersebut, Kurikulum Merdeka bukan hanya mendorong partisipasi aktif siswa, tetapi juga membuka ruang untuk kreativitas guru dalam mendukung pembelajaran yang bermakna dan sesuai kebutuhan tiap individu.⁷

Konsep Merdeka Belajar yang diusung Nadiem Makarim bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan bebas dari tekanan skor atau nilai tertentu.⁸ Fahira, dkk. menyatakan bahwa dalam implementasinya, siswa mendapatkan kebebasan maksimal dalam mengeksplorasi pengetahuan. Kegiatan-kegiatan ilmiah seperti *inquiry*, *discovery*, dan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) difasilitasi melalui tatap muka di kelas maupun kegiatan di luar kelas, termasuk pembelajaran lapangan yang mendukung pemahaman kontekstual.⁹

Kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Pertama, pendekatan berbasis proyek bertujuan mengembangkan keterampilan lunak dan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kedua, fokus pada materi esensial memberi waktu yang memadai bagi siswa untuk memperdalam literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar. Kurikulum ini juga menawarkan fleksibilitas bagi guru dalam menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, menyesuaikan metode pengajaran dengan kemampuan siswa serta mempertimbangkan konteks dan muatan lokal.¹⁰

Namun, meskipun Kurikulum Merdeka berangkat dari tujuan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar di lapangan. Salah satu kendala utama adalah proses pelaksanaan yang terburu-buru, tanpa persiapan memadai bagi guru dan tenaga pendidik.¹¹ Akibatnya, banyak guru belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Merdeka Belajar dan metode pembelajaran yang baru.¹² Sosialisasi yang bertahap sangat diperlukan agar para guru dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan efektif.¹³

⁷ Muhammad Reza Arviansyah dan Ageng Shagena, "Efektivitas dan Peran Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar," *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 17, no. 1 (2022): 40–50, <https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i4.766>.

⁸ Sabriadi HR dan Nurul Wakia, "Problematisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2021): 175–84.

⁹ Wina Roza Fahira dkk., "Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran IPS di SMA 1 Bukit Sundi," *Jurnal Eduscience* 9, no. 3 (2022): 902–9, <https://doi.org/10.36987/jes.v9i3.3484>.

¹⁰ Gustinar Napitupulu, Mardin Silalahi, dan Sariaman Gultom, "Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar," *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 5397–5406.

¹¹ Johar Alimuddin, "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL* 4, no. 2 (2023): 67–75, <https://doi.org/10.47637/griyacendikia.v9i1.1094>.

¹² Mei Nur Rusmiati, Riswati Ashifa, dan Yusuf Tri Herlambang, "Analisis Problematisasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 7, no. 2 (2023): 1490–99, <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i2.2203>.

¹³ Chumi Zahroul Fitriyah dan Rizki Putri Wardani, "Paradigma Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar," *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12, no. 3 (2022): 236–43.

Ketidaksiapan guru dalam menerapkan prinsip-prinsip baru kurikulum turut memengaruhi pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Banyak guru belum memahami perannya dalam membimbing P5, sehingga pelaksanaannya sering kali kurang efektif dan jauh dari tujuan semula¹⁴. Padahal, P5 seharusnya membantu menggali identitas siswa, sehingga guru dapat lebih memahami bakat, minat, dan gaya belajar yang disukai oleh setiap siswa.¹⁵

Di sisi lain, ketidaksesuaian pemahaman terhadap konsep P5 juga memberikan dampak negatif berupa beban ekonomi tambahan bagi siswa. Banyak siswa yang merasa terbebani oleh kebutuhan tambahan yang seharusnya tidak ada, mengingat inklusivitas dan kesetaraan adalah tujuan dari kurikulum ini. Selain itu, meningkatnya beban administrasi bagi guru penggerak menjadi kendala serius yang mengurangi fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka agar tujuan reformasi pendidikan ini dapat tercapai dan memberikan dampak positif nyata bagi seluruh komponen pendidikan di Indonesia. Evaluasi ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kurikulum di masa depan, sehingga pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengevaluasi dan mengkritisi pelaksanaan Kurikulum Merdeka dari perspektif guru, siswa, dan pengelola pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku pendidikan dalam implementasi kurikulum ini.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan sejumlah guru, siswa, dan pengelola pendidikan di berbagai tingkatan sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Wawancara ini berfokus pada pemahaman informan mengenai kesiapan dalam pelaksanaan kurikulum, tantangan yang dihadapi, serta dampak langsung dari penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan beban administrasi yang ditanggung guru.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu kunci yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

¹⁴ Anisa Tri Damayanti dkk., "Literature Review: Problematika Kesiapan Guru Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka," dalam *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*, 2023, 465–71.

¹⁵ Faridahtul Jannah, Thooriq Irtifaq' Fathuddin, dan Putri Fatimatus Az Zahra, "Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022," *Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan* 4, no. 2 (2022).

Analisis ini juga digunakan untuk mengembangkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kurikulum di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Singkat tentang Kurikulum Merdeka

Merdeka Belajar adalah konsep di mana murid dan guru bersama-sama menentukan tujuan belajar, metode pembelajaran, evaluasi, serta refleksi atas materi yang telah dipelajari.¹⁶ Kurikulum Merdeka, sebagai pengembangan dari Kurikulum 2013, menekankan peningkatan potensi dan kompetensi siswa, khususnya dalam keterampilan.¹⁷ Awalnya diterapkan terbatas sebagai Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak, kini kurikulum ini telah diresmikan menjadi Kurikulum Merdeka.¹⁸

Kurikulum Merdeka memberi siswa kebebasan untuk mengelola pembelajaran sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya, dengan siswa sebagai subjek aktif dan guru sebagai fasilitator dan pendamping.¹⁹ Salah satu inovasinya adalah integrasi mata pelajaran IPA dan IPS menjadi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS).²⁰

Kurikulum ini fokus pada empat komponen utama: penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter, penyerahan Ujian Sekolah Berstandar Nasional kepada sekolah, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru.²¹

Penerapan Kurikulum Merdeka memiliki dampak positif, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan pendekatan interaktif, siswa didorong untuk berani berpendapat, menyelidiki, dan menganalisis topik secara mendalam. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga mendorong kreativitas siswa, memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan ide dan berpikir kreatif dalam menghadapi masalah, yang berguna dalam menghadapi tantangan dunia nyata.²²

¹⁶ Najelaa Shihab, *Merdeka Belajar di Ruang Kelas* (Tangerang Selatan: Literati, 2017).

¹⁷ Muhamad Basyrul Muvid dan Ali Ridho, "Kritik Atas Kurikulum Merdeka di Tengah Degradasi Moral Pendidik," *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 16, no. 2 (2022): 18–31, <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6011>.

¹⁸ Sukataman dkk., "Kritik Kepemimpinan Nadhiem Makariem Terhadap Kurikulum Merdeka," *Ibtida: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2023).

¹⁹ Haldiya Syamsiar dkk., "Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis CIPP," *Journal of Education and Instruction* 6, no. 2 (2023).

²⁰ Alya Hasna Afifah dan Arifin Muslim, "Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Rasa Percaya Diri Siswa Melalui Model PBL Berbantu Media Edu-Picture Pada Materi Indonesiaku Kaya Budaya Kelas Iv Sd Negeri 2 Pandak," *JRPP: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 4896–4901.

²¹ M. Rizki Hi Aman, "Kritik Terhadap Ivan Illich Kurikulum Merdeka Dengan Pedagogik," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 13, no. 1 (2024): 125–38.

²² Andrean Syahbana dkk., "Revolusi Pendidikan: Analisis Kurikulum Merdeka Sebagai Inovasi Pendidikan," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 2 (2024).

Keunggulan lain dari Kurikulum Merdeka adalah penyederhanaan kurikulum yang lebih mendalam dan fleksibilitas yang lebih besar. Di tingkat SMA, program peminatan dihapus, sehingga siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan aspirasinya.²³ Kegiatan proyek yang relevan dengan lingkungan juga disusun untuk membantu siswa mengembangkan karakter dan kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Hal ini diharapkan dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang kritis, kreatif, dan aplikatif.²⁴

Kurikulum Merdeka bertujuan menciptakan pembelajaran holistik untuk mencetak pelajar Pancasila yang siap menghadapi masa depan.²⁵ Dengan kurikulum ini, guru memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengajar dan mengenal kebutuhan serta potensi siswa.²⁶ Kurikulum ini berfokus pada kemampuan siswa untuk memilih metode belajar mereka, meskipun tetap mempertahankan standar capaian pembelajaran yang ditetapkan.²⁷

Perubahan kurikulum menuntut adanya penyesuaian kompetensi, khususnya kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh tenaga pendidik.²⁸ Dalam praktik implementasi, pengelola satuan pendidikan belum melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perkembangan dalam bidang keilmuan, materi pelajaran, dan metode penyampaian.²⁹ Langkah ini penting agar setiap komponen pembelajaran dapat terus diperbarui sejalan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.

Pada program Kurikulum Merdeka Belajar, manajemen pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang menarik dan dinamis, sesuai dengan karakteristik utama konsep merdeka belajar. Pembelajaran yang menyenangkan ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.³⁰

²³ Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini, Ni Ketut Suarni, dan I Ketut Suar Adnyana, "Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas," *Jurnal Penjaminan Mutu* 8, no. 2 (2022): 243–50, <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1386>.

²⁴ Ineu Sumarsih dkk., "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 8248–58, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>.

²⁵ Diah Lestari, Masduki Asbari, dan Eka Erma Yani, "Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan," *JISMA: JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT* 2, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.62214/jayu.v1i2.129>.

²⁶ Restu Rahayu dkk., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6313–19, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>.

²⁷ Mulik Cholilah dkk., "Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21," *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 56–67, <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02>.

²⁸ Syahrul Hamdi, Cepi Triatna, dan Nurdin, "Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 7, no. 1 (2022): 10–17, <https://doi.org/10.30998/sap.v7i1.13015>.

²⁹ Yunita dkk., "Implementasi kurikulum merdeka belajar," *Jambura Journal of Educational Management* 4, no. 1 (2023): 16–25, <https://doi.org/10.35335/lebah.v13i2.63>.

³⁰ Muslim HU, "Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 65–70, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.2033>.

Sementara itu, di tingkat sekolah dasar, implementasi Kurikulum Merdeka telah berlangsung cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat mencapai optimalisasi yang diharapkan.³¹ Fokus utama dari program ini bukanlah menggantikan kurikulum sebelumnya, tetapi memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada untuk lebih relevan dengan kebutuhan masa kini.³²

Pentingnya evaluasi terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka mencakup aspek efektivitas, keberlanjutan, dan dampak dari penerapannya di sekolah. Kurikulum sendiri merupakan elemen kunci yang menetapkan landasan, prinsip, arah, dan tujuan pendidikan di Indonesia.³³ Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus berlandaskan pada situasi, kondisi, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.³⁴

Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara bertahap dan fleksibel, dengan kebijakan yang memberikan sekolah kebebasan dalam memilih metode yang sesuai dengan kesiapan masing-masing.³⁵ Pemerintah memberikan tiga pilihan dalam mengaplikasikan Kurikulum Merdeka, yaitu: pertama, tetap menggunakan kurikulum yang berlaku namun mengadaptasi prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka; kedua, menerapkan Kurikulum Merdeka dengan bahan ajar yang telah disediakan; dan ketiga, menerapkan kurikulum dengan bahan ajar yang dikembangkan mandiri oleh sekolah sesuai dengan kerangka Kurikulum Merdeka.³⁶ Dengan adanya pilihan ini, sekolah diharapkan dapat lebih fleksibel dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang paling sesuai.

Perubahan dalam kebijakan pendidikan menuntut tenaga pendidik untuk mampu beradaptasi dengan kurikulum yang terus berkembang. Meskipun dalam penerapannya terdapat sejumlah kendala, Kurikulum Merdeka Belajar masih relatif baru, dan penerapannya belum merata di semua sekolah dasar.³⁷ Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi penambahan jam belajar, kesiapan tenaga pendidik dalam memahami konsep merdeka belajar, perubahan peran peserta didik sebagai subjek aktif,

³¹ Ayu Puspitasari, Akhmad Muadin, dan Agus Salim Salabi, "Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP di SD Bontang," *An-Nizom* 8, no. 1 (2023): 49–58.

³² Heroza Firdaus dkk., "Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 686–92.

³³ Selamat Ariga, "Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 662–70, <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.225>.

³⁴ Difana Leli Anggraini dkk., "Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 290–98, <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>.

³⁵ Dewi Rahmadayani dan Agung Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar," *Jurnal basicedu* 6, no. 4 (2022).

³⁶ Rusmiati, Ashifa, dan Herlambang, "Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar."

³⁷ Siti Zulaiha, Tika Meldina, dan Meisin, "Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar," *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3197>.

peran guru sebagai fasilitator, perubahan metode pengajaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.³⁸

Meski demikian, perlu diakui bahwa Kurikulum Merdeka hadir sebagai inovasi pendidikan yang bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi pelajar Indonesia agar lebih siap menghadapi era global. Melalui fleksibilitas yang diberikan, kurikulum ini memungkinkan sekolah dan guru menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai potensi serta minat siswa, menjadikan mereka subjek aktif dalam proses belajar. Kendati pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, transformasi ini tidak hanya memperbarui kurikulum yang ada, tetapi juga berupaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang lebih progresif dan inklusif di masa depan.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Beberapa Sekolah

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah di Indonesia dilakukan secara mendadak tanpa persiapan yang memadai, baik dari segi infrastruktur, pelatihan guru, maupun sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Dampaknya, banyak guru yang merasa tidak siap untuk mengimplementasikan kurikulum baru ini. Hal ini menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), di mana guru tidak memahami sepenuhnya konsep dan tujuan P5, serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran sehari-hari.

Selain itu, pembimbing P5 di banyak sekolah belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawabnya, sehingga implementasi P5 tidak berjalan secara efektif. Kurangnya persiapan ini juga berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, karena guru masih kebingungan dengan materi dan metode yang harus digunakan sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

Nuzulul Furqon, seorang guru di SMPN Malang, membagikan pandangannya mengenai penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka. Menurutinya, penerapan P5 di sekolahnya tidak memerlukan banyak biaya karena bahan yang digunakan umumnya berasal dari bahan yang murah atau memanfaatkan bahan bekas. Namun, ada pengecualian ketika kegiatan seperti *outing class* diadakan, yang memang membutuhkan biaya tambahan.

Nuzulul juga mengakui bahwa P5 sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan kreativitas baik siswa maupun guru. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika mengimplementasikan beberapa tema yang menurutnya terkadang terlalu sulit diterapkan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan kadang terlihat dipaksakan agar sesuai dengan tema yang ada.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kondisi pelaksanaan juga kerap kurang kondusif. Jumlah siswa yang banyak tidak seimbang dengan jumlah guru penanggung jawab yang terbatas, sehingga guru-

³⁸ Ibrahim dkk., "Evaluasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2024): 1–7.

guru lain yang tidak terlibat langsung dalam P5 merasa tidak terbebani oleh kegiatan tersebut dan bebas dari tugas tambahan. Akhirnya, penerapan P5 tidak berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Kumairoh, seorang pendidik di MA Al Fatah Pasuruan, berbagi pengalaman tentang implementasi Kurikulum Merdeka di sekolahnya. Menurutnya, pelaksanaan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya diterapkan di sekolahnya, karena masih menunggu SK resmi untuk penerapannya. Pengajuan sudah dilakukan, dan kini hanya menunggu persetujuan tersebut.

Kumairoh menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah terlihat dalam penggunaan LKS atau buku ajar berbasis kurikulum baru, yang mengedepankan soal literasi, numerasi, serta bentuk soal dan jawaban yang lebih kompleks. Pada kegiatan pembelajaran, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk menentukan kegiatan dan materi, termasuk menggabungkan beberapa bab ke dalam satu pertemuan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Terkait Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin (P5RLA), ia menyebutkan bahwa beberapa kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS sebagai bentuk pembelajaran demokrasi serta kegiatan kewirausahaan seperti bazar sudah dilaksanakan. Sekolah berkomitmen untuk mengadakan minimal tiga kegiatan P5RLA setiap tahunnya.

Menurut Kumairoh, keuntungan utama dari Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitasnya yang memberi kebebasan kepada guru dalam menentukan model pembelajaran. “Sebenarnya tidak ada yang negatif. Semua tergantung pada guru, apakah mereka bisa menerapkannya dan memastikan siswa dapat memahami materi dengan baik,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan P5, Kumairoh mencatat bahwa program ini umumnya menggunakan dana sekolah. Namun, ia menekankan bahwa kegiatan P5 tidak harus mahal atau mewah. Kegiatan sederhana seperti membuat batik atau mendaur ulang plastik menjadi karya seni juga bisa menjadi bagian dari P5 selama tujuannya tercapai. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarguru untuk melaksanakan P5 secara efektif, misalnya pada tema demokrasi, di mana berbagai mata pelajaran seperti PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan Qurdis dapat saling mendukung kegiatan tersebut.

Dewi Qurroti Ainina, guru di MA Al Hikmah, Purwoasri, Kediri, menjelaskan tantangan dan strategi dalam penerapan Kurikulum Merdeka di sekolahnya yang berorientasi pada pendidikan pesantren. MA Al Hikmah adalah sekolah berbasis pesantren, di mana sebagian besar siswanya diwajibkan untuk mondok. Hal ini memengaruhi pelaksanaan kurikulum, karena para siswa dibatasi dalam penggunaan teknologi, seperti ponsel, untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran tambahan. Kebanyakan guru masih menggunakan kurikulum lama, menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada di lingkungan pesantren.

Di sisi lain, siswa di MA Al Hikmah lebih menyukai metode pembelajaran pada kurikulum lama, sebab Kurikulum Merdeka menuntut siswa untuk lebih aktif dan mandiri, sementara siswa tidak membawa ponsel untuk browsing atau mencari bahan tambahan, dan akses terhadap buku pun terbatas.

Untuk penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila, Dewi menjelaskan bahwa program ini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Karena siswa tidak diizinkan keluar dari lingkungan pesantren, guru harus berpikir kreatif agar P5 dapat dilaksanakan secara optimal tanpa membebani siswa. Sebagai contoh, dalam tema kehidupan tradisional, para siswa diajak membuat permainan tradisional. Dalam tema hidup berkelanjutan, peserta didik melakukan praktik bertanam jahe, menggunakan pupuk organik yang dibuat dari sisa makanan dan sampah organik.

Dalam pelaksanaan P5 ini, Dewi menekankan pentingnya peran guru untuk memastikan kegiatan tetap sederhana dan tidak memberatkan siswa dalam hal biaya maupun akses informasi. Para siswa hanya perlu melakukan kegiatan yang diarahkan oleh guru, sehingga semua bisa terlaksana dengan baik meski dengan sumber daya terbatas.

Nurul Azizah, seorang guru kelas di SD Negeri Pasuruan, menyampaikan pandangannya tentang implementasi Kurikulum Merdeka (Kurmer) di sekolahnya. Menurutnya, penerapan Kurikulum Merdeka ini belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak, termasuk pengawas yang terkesan hanya mengamati tanpa adanya pendampingan mendalam. Ia mengungkapkan bahwa perubahan yang dirasakan hanya sebatas penggantian istilah, seperti RPP yang kini disebut modul ajar. Meski ada sedikit penyesuaian dalam materi yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti penambahan kegiatan salat Dhuha dan Jumat, keseluruhan pelaksanaannya masih mirip dengan kurikulum sebelumnya, K13.

Nurul mencatat bahwa Kurmer memiliki kelebihan dalam memasukkan materi yang relevan dengan kehidupan nyata. Namun, ia mengkritisi jumlah jam pelajaran (JP) yang berkurang dalam Kurmer dibanding K13, khususnya untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam K13, PAI diberikan empat JP per minggu, dengan keterampilan dan pengetahuan yang diatur oleh guru. Sementara itu, dalam Kurmer, ada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing sekolah. Sekolah Nurul memilih untuk melaksanakan P5 secara penuh di akhir semester, berbeda dengan beberapa sekolah lain yang mencicilnya tiap minggu.

Nurul juga mengamati bahwa P5 dalam Kurmer sering kali menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh sekolah, sehingga cenderung kurang efektif karena materinya sudah dipelajari di kelas. Bagi Nurul, perubahan ini justru tidak memberikan dampak signifikan. Ia merasa format nilai yang terpisah antara keterampilan dan pengetahuan di K13 lebih jelas dibandingkan dengan format rapor P5 di Kurmer.

Selain itu, ia juga mengkritisi aspek administrasi Kurmer yang dianggapnya lebih rumit. Pada K13, RPP hanya terdiri dari satu halaman, sementara dalam Kurmer, modul ajar bisa mencapai 15 halaman jika tidak dikelola dengan baik. Pengawas masih menuntut agar semua dokumen dicetak, meskipun pemerintah tidak mewajibkannya, sehingga administrasi menjadi lebih memberatkan guru.

May Sarah, seorang guru SD di Lampung, berbagi pengalamannya tentang penerapan Kurikulum Merdeka (Kurmer) di luar Pulau Jawa. Menurutnya, implementasi Kurmer di luar Jawa belum maksimal, dengan banyak sekolah yang masih beradaptasi. Di sekolahnya, Kurmer telah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022, dimulai dari kelas 1 dan 4. Pada tahun 2023, kelas 5 turut menggunakan Kurmer, dan pada tahun ini seluruh kelas 1 hingga 6 sudah menggunakan kurikulum tersebut. Ia merasa bahwa implementasi Kurmer di sekolahnya cukup efektif karena para guru mendapatkan pelatihan dan fasilitas yang mendukung.

Meski begitu, May menyebutkan bahwa salah satu kekurangan Kurmer adalah kompleksitas administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan K13. Menurutnya, meskipun disebut "merdeka," Kurmer justru terasa lebih menuntut secara administratif dibandingkan K13. Namun, kelebihan dari Kurmer ini adalah sekolah memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik sekolah dan siswa. Guru juga memiliki fleksibilitas dalam memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dari sudut pandang May, ia pribadi lebih menyukai K13, bukan hanya karena lebih simpel, tetapi juga karena materi dalam buku K13 dianggap lebih relevan. Salah satu masalah yang ia temukan dalam Kurmer adalah kebijakan yang tidak membolehkan siswa tinggal kelas, terlepas dari nilai atau kemampuannya. Kebijakan ini, menurutnya, bisa membuat siswa kurang bertanggung jawab dalam belajar, karena merasa bahwa apapun hasilnya, peserta didik akan tetap naik kelas.

May juga mencatat bahwa murid-murid menikmati variasi metode pembelajaran yang diterapkan dalam Kurmer. Guru didorong untuk menggunakan berbagai metode menarik dalam pembelajaran, sehingga siswa bisa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan.

Terkait dengan pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), May menilai kegiatan ini tidak memberatkan. P5 dilakukan berdasarkan kesepakatan sekolah, dan tidak harus ditampilkan dalam bentuk pementasan besar. Pementasan biasanya dalam bentuk pameran, di mana seluruh biaya dibiayai oleh sekolah, termasuk dekorasi dan konsumsi. Dalam tema kewirausahaan, sekolah pernah mengajak partisipasi orang tua untuk patungan menyediakan makanan yang kemudian dijual kembali, dan hasilnya disumbangkan ke pihak yang membutuhkan.

Kesalahpahaman Konsep P5 dan Beban Ekonomi pada Siswa

Projek untuk memperkuat profil Pelajar Pancasila dirancang berdasarkan tema yang ditetapkan pemerintah dan tidak terikat pada capaian pembelajaran atau konten mata pelajaran tertentu.³⁹ Profil Pelajar Pancasila menggambarkan pelajar Indonesia sebagai individu yang kompeten, berakarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) berkebinekaan global, 3) bergotong-royong, 4) mandiri, 5) bernalar kritis, serta 6) kreatif.⁴⁰

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk karakter siswa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Namun, dari hasil wawancara, ditemukan bahwa banyak sekolah dan guru yang salah memahami konsep ini. Kesalahpahaman muncul dalam bentuk anggapan bahwa P5 harus diterapkan melalui kegiatan besar dan formal seperti pementasan atau pameran yang membutuhkan persiapan dan biaya tinggi. Misalnya, beberapa sekolah melaksanakan kegiatan P5 yang memerlukan dekorasi besar, biaya operasional tambahan, atau acara yang melibatkan orang tua siswa, sehingga konsep sederhana dari P5 menjadi terdistorsi.

Misinterpretasi ini mengakibatkan guru-guru merasa harus melakukan kegiatan P5 secara berlebihan, padahal kegiatan sederhana seperti permainan tradisional atau kegiatan daur ulang sudah memenuhi tujuan P5, sebagaimana yang dicontohkan oleh Dewi Qurroti Ainina dan May Sarah. Narasumber menjelaskan bahwa kegiatan P5 dapat dilakukan melalui aktivitas sehari-hari yang melibatkan keterampilan hidup dan partisipasi siswa tanpa harus menambah beban ekonomi.

Akibat kesalahpahaman konsep P5 ini, muncul beban ekonomi tambahan bagi siswa dan orang tua, terutama di sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas atau berada di daerah dengan ekonomi yang terbatas. Beberapa sekolah memandang bahwa kegiatan P5 harus dilaksanakan dengan melibatkan kontribusi finansial dari orang tua atau murid, meskipun sifat dari P5 seharusnya inklusif dan dapat dicapai tanpa biaya yang signifikan.

Misalnya, May Sarah di Lampung menjelaskan bahwa kegiatan P5 di sekolahnya didesain agar tidak memberatkan siswa dan keluarga, dan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh sekolah. Namun, di beberapa sekolah lain, orang tua tetap diminta untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan P5, terutama untuk kegiatan yang bersifat kewirausahaan atau sosial. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua, meskipun ada yang tidak keberatan, terutama ketika kontribusi tersebut disalurkan untuk tujuan amal.

Beban finansial yang ditimbulkan dari misinterpretasi P5 ini berdampak pada persepsi siswa dan orang tua terhadap Kurikulum Merdeka. Alih-alih mendukung pembelajaran yang bermakna,

³⁹ Anggraini dkk., "Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka."

⁴⁰ Hamdi, Triatna, dan Nurdin, "Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik."

banyak orang tua merasa terbebani dengan tuntutan finansial dari sekolah. Hal ini dapat mengurangi antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan P5, mengingat bahwa tujuan utama dari Kurikulum Merdeka adalah menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan mendorong kreativitas tanpa batasan finansial.

Dengan adanya tekanan ekonomi ini, konsep Kurikulum Merdeka yang diharapkan memberikan "kemerdekaan" belajar bagi siswa, justru seolah bertolak belakang dengan realita yang dihadapi di lapangan. Siswa dan orang tua, khususnya dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan kegiatan P5, sehingga mungkin menilai P5 sebagai beban tambahan daripada kesempatan pengembangan diri.

Beberapa guru berinisiatif menyederhanakan kegiatan P5 agar lebih terjangkau dan tidak membebani siswa. Nurul Azizah dari Pasuruan menekankan bahwa P5 dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana atau kegiatan sehari-hari yang tetap memiliki nilai pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan bahan bekas untuk kegiatan daur ulang atau permainan tradisional yang tidak membutuhkan biaya besar.

Pendekatan ini mencerminkan bahwa jika dilaksanakan dengan tepat, kegiatan P5 dapat tetap menarik dan edukatif tanpa memberatkan siswa. Upaya ini dapat menjadi solusi bagi sekolah dan guru dalam memahami bahwa esensi dari P5 bukanlah kegiatan besar atau mewah, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan secara nyata dalam kehidupan siswa.

Beban Administrasi yang Berat bagi Guru, Khususnya Guru Penggerak

Program guru penggerak pada Kurikulum merdeka, menuntut guru harus mampu mengelola pembelajaran secara efektif dengan menggunakan berbagai metode dan teknologi.⁴¹ Kurikulum Merdeka, meskipun bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam pengajaran, ternyata menambah beban administrasi yang signifikan bagi guru penggerak. Guru penggerak yang seharusnya menjadi pionir dalam mengimplementasikan kurikulum ini, justru terhambat oleh tugas-tugas administratif yang berlebihan, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, pelaporan kegiatan P5, hingga evaluasi yang harus dilaporkan secara berkala.

Beban administrasi ini tidak hanya menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, tetapi juga menyebabkan kelelahan dan stres di kalangan guru. Akibatnya, semangat untuk menggerakkan perubahan dalam pendidikan tereduksi oleh beban administratif yang tidak proporsional. Situasi ini

⁴¹ Meria Ultra Gusteti dan Neviyarni, "Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Pembelajaran Matematika di Kurikulum Merdeka," *Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika* 3, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.4324/9781003175735-15>.

menuntut adanya evaluasi ulang terhadap distribusi tugas-tugas administrasi, agar guru penggerak dapat lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan tujuan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka (Kurmer) dimaksudkan untuk memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran, baik bagi siswa maupun guru. Namun, dalam praktiknya, Kurmer justru menambah beban administrasi bagi para guru, khususnya guru penggerak yang bertugas melaksanakan dan memfasilitasi penerapan kurikulum ini. Berdasarkan wawancara, beberapa guru merasa bahwa administrasi dalam Kurmer lebih rumit dan menyita waktu, dengan dokumen dan laporan yang harus dipenuhi lebih banyak dibandingkan dengan Kurikulum 2013.

Nurul Azizah, guru di Pasuruan, menyoroti bahwa meskipun RPP dalam Kurikulum 2013 telah disederhanakan menjadi satu halaman, dalam Kurmer formatnya menjadi modul ajar yang bisa mencapai lebih dari 15 halaman jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini sangat menyulitkan karena selain memakan waktu untuk penyusunan, dokumen tersebut juga sering kali harus dicetak ketika ada pengawasan, meskipun secara kebijakan resmi tidak diwajibkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kurmer sebenarnya belum sepenuhnya memberi kebebasan bagi guru, justru sebaliknya, tuntutan administrasi yang banyak malah membatasi waktu guru dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran.

Guru-guru juga merasa bahwa beban administrasi ini bertolak belakang dengan prinsip “merdeka” yang diusung Kurmer. Seperti yang dikatakan oleh May Sarah di Lampung, administrasi Kurmer tidak hanya bertambah tetapi juga mengurangi waktu bagi guru untuk lebih berfokus pada interaksi langsung dengan siswa dan penyampaian materi yang optimal. Akibatnya, guru-guru penggerak merasa terbebani secara administrasi tanpa adanya dukungan yang memadai dalam bentuk pelatihan yang menyeluruh dan efisien untuk menghadapi transisi kurikulum.

Kritik terhadap Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka mendapat beragam kritik dalam pelaksanaannya, mulai dari kesiapan guru hingga efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih bebas dan adaptif. Beberapa guru mengungkapkan bahwa pada praktiknya, pelaksanaan Kurmer di sekolahnya tidak berbeda jauh dengan Kurikulum 2013. Perubahan dalam Kurmer terlihat seperti hanya ganti nama dan pengorganisasian format saja, sementara substansi pembelajaran masih serupa dengan kurikulum sebelumnya.

May Sarah mengungkapkan bahwa di sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa, penerapan Kurmer masih menghadapi tantangan yang besar karena ketidaksiapan fasilitas, keterbatasan pelatihan, serta adaptasi yang kurang efektif dari guru-guru. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan Kurmer antara sekolah-sekolah di daerah dengan fasilitas lengkap dan sekolah-sekolah di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Ketidaksiapan guru dalam menghadapi perubahan ini berpotensi menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah-wilayah di Indonesia, yang justru

bertentangan dengan tujuan Kurmer yang ingin menciptakan kemerdekaan dalam belajar di semua daerah.

Selain itu, Nurul Azizah dari Pasuruan menyoroti bahwa perbedaan mendasar dalam penilaian antara Kurikulum 2013 dan Kurmer, khususnya pada pembelajaran dan penilaian keterampilan, cenderung membingungkan. Di Kurmer, misalnya, penilaian keterampilan dan pengetahuan siswa digabungkan, sehingga kurang transparan dalam menunjukkan perkembangan masing-masing aspek pembelajaran. Hal ini berbeda dengan K13, di mana keterampilan dan pengetahuan dinilai secara terpisah, yang menurutnya lebih efektif dan jelas dalam menggambarkan perkembangan siswa. Ia juga menilai bahwa anggaran besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Kurmer kurang sepadan dengan dampak nyata yang dirasakan di lapangan.

Beban administrasi dan ketidaksiapan pelaksanaan Kurmer berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas. Beban administrasi yang tinggi mengakibatkan guru kehilangan banyak waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk merancang metode pengajaran yang kreatif dan inovatif. Misalnya, pada proyek P5, guru sering kali kesulitan untuk menyeimbangkan antara persiapan administratif dengan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya mendorong pembelajaran yang partisipatif dan menyenangkan.

Kritik juga muncul terkait dengan ketidakpastian dalam penilaian kenaikan kelas yang diatur oleh Kurikulum Merdeka. May Sarah mencatat bahwa dalam Kurmer, siswa tidak boleh tinggal kelas, yang berdampak pada hilangnya tanggung jawab belajar bagi beberapa siswa. Dengan kebijakan ini, siswa mungkin merasa bahwa akan tetap naik kelas meskipun tidak mencapai standar tertentu dalam pembelajaran. Hal ini dikhawatirkan dapat melemahkan motivasi siswa untuk belajar dan berprestasi, karena tidak merasa adanya konsekuensi yang signifikan dari hasil belajarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka, beberapa langkah penyempurnaan perlu dilakukan. Pertama, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penyederhanaan format administrasi sehingga beban administratif bagi guru dapat berkurang. Pengurangan format laporan yang terlalu rumit dan panjang akan memberikan guru lebih banyak waktu untuk fokus pada pengembangan strategi pengajaran.

Kedua, pemerintah perlu melakukan pelatihan yang merata dan berkelanjutan bagi guru di seluruh wilayah, khususnya di luar Pulau Jawa. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi Kurmer, diharapkan tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman yang menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pelaksanaan di berbagai daerah.

Terakhir, kebijakan kenaikan kelas sebaiknya ditinjau kembali agar tetap memberikan insentif bagi siswa untuk terus belajar dan berprestasi. Dengan adanya mekanisme penilaian yang lebih jelas dan transparan, siswa akan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta merasa memiliki tanggung jawab atas hasil belajar.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Implementasi yang terlalu mendadak menyebabkan ketidaksiapan di kalangan guru. Selain itu, kesalahpahaman terhadap konsep P5 telah menyebabkan beban ekonomi pada siswa, terutama bagi yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial. Hal ini mengindikasikan perlunya panduan yang lebih jelas dan dukungan yang memadai agar konsep P5 dapat diterapkan sesuai dengan prinsip inklusivitas. Selain itu, beban administrasi yang berat yang harus dipikul oleh guru menghambat upaya untuk benar-benar berfokus pada inovasi dan kreativitas dalam pengajaran.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan tujuan Kurikulum Merdeka, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terencana, termasuk pelatihan yang lebih baik bagi guru, penyediaan sumber daya yang memadai, serta penyesuaian beban kerja administratif. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat benar-benar menjadi alat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan mampu membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Alya Hasna, dan Arifin Muslim. "Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Rasa Percaya Diri Siswa Melalui Model PBL Berbantu Media Edu-Picture Pada Materi Indonesiaku Kaya Budaya Kelas Iv Sd Negeri 2 Pandak." *JRPP: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 4896–4901.
- Alimuddin, Johar. "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL* 4, no. 2 (2023): 67–75. <https://doi.org/10.47637/griyacendikia.v9i1.1094>.
- Aman, M. Rizki Hi. "Kritik Terhadap Ivan Illich Kurikulum Merdeka Dengan Pedagogik." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 13, no. 1 (2024): 125–38.
- Anggraini, Difana Leli, Marsela Yulianti, Siti Nurfaizah, dan Anjani Putri Belawati Pandiangan. "Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 290–98. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>.
- Ariga, Selamat. "Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 662–70. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.225>.
- Arviansyah, Muhammad Reza, dan Ageng Shagena. "Efektivitas dan Peran Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar." *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 17, no. 1 (2022): 40–50. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i4.766>.
- Barlian, Ujang Cepi, Siti Solekah, dan Puji Rahayu. "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 12 (2022). <https://doi.org/10.21608/psjhj.2022.250026>.
- Cholilah, Mulik, Anggi Gratia Putri Tatuwo, Komariah, Shinta Prima Rosdiana, dan Achmad Noor Fatirul. "Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21." *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 56–67. <https://doi.org/10.58812/spp.v1.i02>.

- Damayanti, Anisa Tri, Benny Eka Pradana, Berty Prananta Putri, dan Hanifa Nur Laila. "Literature Review: Problematika Kesiapan Guru Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka." Dalam *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*, 465–71, 2023.
- Fahira, Wina Roza, Putri Rahmadhani, Noki Satria, Fika Melisa, dan Merika Setiawati. "Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran IPS di SMA 1 Bukit Sundi." *Jurnal Eduscience* 9, no. 3 (2022): 902–9. <https://doi.org/10.36987/jes.v9i3.3484>.
- Firdaus, Heroza, Azkya Milfa Laensadi, Gupo Matvayodha, Fitri Nauli Siagian, dan Ika Aryastuti Hasanah. "Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 686–92.
- Fitriyah, Chumi Zahroul, dan Rizki Putri Wardani. "Paradigma Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar." *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12, no. 3 (2022): 236–43.
- Gusteti, Meria Ultra, dan Neviyarni. "Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Pembelajaran Matematika di Kurikulum Merdeka." *Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.4324/9781003175735-15>.
- Hamdi, Syahrul, Cepi Triatna, dan Nurdin. "Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 7, no. 1 (2022): 10–17. <https://doi.org/10.30998/sap.v7i1.13015>.
- HR, Sabriadi, dan Nurul Wakia. "Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2021): 175–84.
- HU, Muslim. "Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 65–70. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.2033>.
- Ibrahim, Dela Sintia, Rinto Pardika, Novita Eka Sari, dan Sepralin Tesva. "Evaluasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2024): 1–7.
- Jannah, Faridahtul, Thooriq Irtifaq' Fathuddin, dan Putri Fatimatuus Az Zahra. "Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022." *Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan* 4, no. 2 (2022).
- Jannati, Putri, Faisal Arief Ramadhan, dan Muhamad Agung Rohimawan. "Peran Guru Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35931/am.v7i1.1714>.
- Lestari, Diah, Masduki Asbari, dan Eka Erma Yani. "Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan." *JISMA: JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT* 2, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.62214/jayu.v1i2.129>.
- Muvid, Muhamad Basyrul, dan Ali Ridho. "Kritik Atas Kurikulum Merdeka di Tengah Degradasi Moral Pendidik." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 16, no. 2 (2022): 18–31. <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6011>.
- Napitupulu, Gustinar, Mardin Silalahi, dan Sariaman Gultom. "Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar." *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 5397–5406.
- Pratycia, Angel, Arya Dharma Putra, Aulia Ghina Maharani Salsabila, Febri Ilhami Adha, dan Ahmad Fuadin. "Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 58–64. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1974>.
- Priantini, Dewa Ayu Made Manu Okta, Ni Ketut Suarni, dan I Ketut Suar Adnyana. "Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas." *Jurnal Penjaminan Mutu* 8, no. 2 (2022): 243–50. <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1386>.

M. Afiquil Adib: Evaluasi dan Kritik terhadap Pelaksanaan Kurikulum Merdeka: Perspektif Guru, Siswa, dan Pengelola Pendidikan

- Puspitasari, Ayu, Akhmad Muadin, dan Agus Salim Salabi. "Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP di SD Bontang." *An-Nizom* 8, no. 1 (2023): 49–58.
- Rahayu, Restu, Rita Rosita, Yuyu Sri Rahayuningsih, Asep Herry Hernawan, dan Prihantini. "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak." *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6313–19. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>.
- Rahmadayani, Dewi, dan Agung Hartoyo. "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar." *Jurnal basicedu* 6, no. 4 (2022).
- Rusmiati, Mei Nur, Riswati Ashifa, dan Yusuf Tri Herlambang. "Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar." *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 7, no. 2 (2023): 1490–99. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i2.2203>.
- Shihab, Najelaa. *Merdeka Belajar di Ruang Kelas*. Tangerang Selatan: Literati, 2017.
- Sukataman, Kaifa Baits Musyaffa, Sayekti Putri Wardhani, dan Siti Alfiyah. "Kritik Kepemimpinan Nadiem Makarim Terhadap Kurikulum Merdeka." *Ibtida: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2023).
- Sumarsih, Ineu, Teni Marliyani, Yadi Hadiyansah, Asep Herry Hernawan, dan Prihantini. "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 8248–58. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>.
- Suryaman, Maman. "Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar." Dalam *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 13–28, 2020.
- Syabhana, Andrean, Masduki Asbari, Vinni Anggitia, dan Hwang Andre. "Revolusi Pendidikan: Analisis Kurikulum Merdeka Sebagai Inovasi Pendidikan." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 2 (2024).
- Syamsiar, Huldya, Muzakki, I Gede Ratnaya, dan I Wayan Widiana. "Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis CIPP." *Journal of Education and Instruction* 6, no. 2 (2023).
- Vhalery, Rendika, Albertus Maria Setyastanto, dan Ari Wahyu Leksono. "Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur." *Research and Development Journal of Education* 8, no. 1 (2022): 185–201. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>.
- Wulandari, Cut Reza, Tia Ayu Ningrum, dan Syahril. "Kepemimpinan Transformasional Kepala SMK Negeri Se-Kota Padang." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 1 (2024): 66–75. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i1.250>.
- Yunita, Ahmad Zainuri, Ibrahim, Achmad Zulfi, dan Mulyadi. "Implementasi kurikulum merdeka belajar." *Jambura Journal of Educational Management* 4, no. 1 (2023): 16–25. <https://doi.org/10.35335/lebah.v13i2.63>.
- Zulaiha, Siti, Tika Meldina, dan Meisin. "Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar." *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3197>.